



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2025

**a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan**



Digital Signature
[mk912463856250214072643](#)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65
2.	Meningkatnya kualitas layanan peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 89,17
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75
		3. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3.32
		4. Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi	3.92
		5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
		6. Nilai Reformasi Birokrasi	90.01

Program	Anggaran
Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 416,603,131,000
Dukungan Manajemen	Rp 194,873,947,000
Jumlah	Rp 611.477.078.000

Jakarta, 2 Januari 2025

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk2112012178250218065007

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)			(9)	
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi																
a	Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	MK mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari: 1) Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi; 2) Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara; 3) Rata-rata waktu penyelesaian perkara; 4) % Penyelesaian Jumlah Perkara yang diputus. 5) Tingkat Implementasi Pelaksanaan Putusan 6) (Menjaga Pancasila dan Nilai-nilai Konstitusi, Berdasarkan Hukum dan Prosedur yang berlaku, Memiliki dasar pertimbangan yang kuat, Mudah Dipahami, Dapat dilaksanakan (eksekutabel)													Skor 91,03	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
b	Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, dengan responden dari masyarakat yang pernah mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.													Skor 91,65	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
2	Meningkatnya kualitas layanan peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya																



No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 89,17	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh MK. Untuk mengukur sejauhmana kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK maka dilaksanakan survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK. Sistem peradilan tersebut terkait dengan: 1) Layanan Penanganan Perkara 2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara 3) Layanan Aksesibilitas 4) Layanan pengelolaan perpustakaan 5) Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi 6) Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi										Skor 89,17			Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	Nilai 77,75	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja].												Nilai 77,75	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
c	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	Nilai 3.32	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan skor SPIP, MRI, dan IEPK												Nilai 3.32	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi



No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
				Jadwal dan Target Kegiatan														
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
d	Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi	Nilai 3.92	<p>Pengukuran kematangan atau maturitas SPBE merujuk pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana terdapat 47 indikator penilaian di domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE</p> <p>Penghitungan nilai indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020.</p> <p>Predikat Indeks SPBE</p> <ol style="list-style-type: none"> 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 – 4,2 Sangat Baik 2,6 – 3,5 Baik 1,8 – 2,6 Cukup <1,8 Kurang 															Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
e	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	<p>Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah; Kecukupan Pengungkapan; Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan Efektivitas SPI. 															Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
f	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 90,01	<p>Nilai Reformasi Birokrasi diperoleh dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.</p>														Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	



No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.														

Jakarta, 2 Januari 2025

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Jakarta, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,



Heru Setiawan



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk923364663250214073227

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,75
		2. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 84,5
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,09
		4. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai 98,67
2.	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Nilai 3,32
		2. Indeks Survei Penilaian Integritas	Skor 82,15
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Tingkat Pengawasan Kearsipan	Nilai 90,65
		2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Nilai 3,1
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 87,12
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN	83
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 81,56
5.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88



No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
	Penanganan Perkara Konstitusi	2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%
		3. Indeks Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Nilai 88
		4. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai 3,8
		5. Indeks Kualitas Kerjasama Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	Skor 76
		6. Indeks Reformasi Hukum	Nilai 98,35
		7. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Skor 85,83
6.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65
7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	1. Tingkat Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	Nilai 3
		2. Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	Skor 82
8.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88,78
		2. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi	3,4
		3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,25



Program	Anggaran
Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 416.603.301.000
Dukungan Manajemen	Rp 194.873.947.000
Jumlah	Rp 611.477.078.000

Ketua Mahkamah Konstitusi,



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Jakarta, 2 Januari 2025
Sekretaris Jenderal,



Heru Setiawan



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk456929136250214074231

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)	(9)		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya															
a.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,75	Indikator ini merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB												77,75	Biro Humas dan Protokol
b.	Indeks Layanan Administrasi Umum	84.5	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada unit kerja. Rumus Jumlah Keseluruhan Skor Survey Internal Jumlah Survey Internal yang									Skor 84.5				Biro Perencanaan dan Keuangan



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<p>dilaksanakan</p> <p>Survey Internal tersebut terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan 2. Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas RB 3. Tingkat Kepuasan Layanan SDM 4. Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN 5. Tingkat Layanan Huku 6. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi 7. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi 8. Tingkat Layanan Kehumasan 9. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan 10. Tingkat Layanan Biro Umum 														



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			11. Tingkat Layanan rekomendasi kebijakan strategis 12. Tingkat Layanan Sistem Informasi 13. Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 14. Tingkat Layanan Pengawasan Intern														
c.	Nilai IKPA	96,09	IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. IKPA merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)	Nilai 96,09												Biro Perencanaan dan Keuangan	
d.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	98,67	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah ukuran kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 											Nilai 98,67		Biro Perencanaan dan Keuangan	



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)														
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			daerah, Kementerian, dan Lembaga. • IPPN dilakukan untuk mengukur keselarasan perencanaan dengan tujuan pembangunan nasional. • IPPN dinilai setiap tahun oleh Kementerian PPN/Bappenas															
2.	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal																	
	a. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Nilai 3,32	• Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang kemampuan SPIP dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara • Penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan										Nilai 3,32					Inspektorat



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Keuangan dan Pembangunan (BPKP)														
	b.	Indeks Survei Penilaian Integritas	Skor 82,15	<ul style="list-style-type: none"> Indeks SPI digunakan untuk memetakan dan memantau risiko korupsi, serta untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik. Indeks ini dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 												Skor 82,15	Inspektorat
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya																
	a	Tingkat Pengawasan Kearsipan	90,65	<ul style="list-style-type: none"> Indeks ini merupakan hasil penilaian dari ANRI 												90,65	Biro Umum



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<ul style="list-style-type: none"> Penilaian tingkat pengawasan kearsipan oleh Arsip pada aspek-aspek tertentu, seperti kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, dan sumber daya kearsipan 														
b	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	3.1	<ul style="list-style-type: none"> Indeks ini merupakan hasil penilaian dari DJKN Indikator kinerja pengelolaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN). IPA digunakan sebagai alat ukur kualitas pengelolaan BMN. 													3.1	Biro Umum
c	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	87.12	<ul style="list-style-type: none"> Indeks ini merupakan hasil penilaian dari DJKN ITKP digunakan untuk menilai kualitas dan integritas pengadaan barang 													87,12	Biro Umum



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)														
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			dan jasa pemerintah															
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional																	
a	Indeks Profesionalitas ASN	83	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Indeks ini didasarkan pada kompetensi, kinerja, kedisiplinan, dan kualifikasi pendidikan ASN Indeks ini merupakan hasil penilaian dari BKN 														83	Biro SDM dan Organisasi
b	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 81,56	Indeks ASN BerAKHLAK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi														Nilai 81,56	



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			budaya kerja ASN. Indeks ini dibuat oleh Kementerian PANRB.														
5.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi																
a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Indikator ini melalui survey • Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan 										Skor 88				Biro Hukum dan Adminitasri Kepaniteraan
b	Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	Rumus : Jumlah Perkara Konstitusi yang diputus / Jumlah Perkara yang diregistrasi ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) x 100%												70%		



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Kementerian PAN dan RB														
e	Indeks Kualitas Kerjasama Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	Skor 81	Target tercapai jika hasil 81 survei Tingkat Kualitas Kelembagaan MK													Skor 81	Biro Humas dan Protokol
e	Indeks Reformasi Hukum	Nilai 98,35	<ul style="list-style-type: none"> Indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip hukum. IRH juga digunakan untuk mengevaluasi regulasi yang sudah berjalan Indikator ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM 													Nilai 98,35	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
f	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Skor 85,83	Indikator ini merupakan hasil survey eksternal untuk mengukur kemudahan dalam berperkara di MK dan mengakses											Skor 85,83		1. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 2. Biro Umum	



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			layanan peradilan di MK														
6.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi																1. Pusdik Pancasila dan Konstitusi 2. Biro Humas dan Protokol
a	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Indikator ini untuk Mengukur tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan survei eksternal											Skor 91,65			1. Pusdik Pancasila dan Konstitusi 2. Biro Humas dan Protokol
7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan dan Literasi Konstitusi																
a	Tingkat Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap	Nilai 3	Indikator kinerja ini diukur dengan melihat Kualitas Rekomendasi Kebijakan penilaian apakah mencakup dimensi seperti relevansi, kejelasan, dasar ilmiah,												Nilai 3		Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penguatan Kelembagaan		kelayakan dan inovasi. Penilaian Iku ini akan melibatkan Hakim Konstitusi, Ahli/Pakar														
	b	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	Nilai 82	Indikator ini merupakan hasil survei internal/eksternal atas layanan perpustakaan dan literasi konstitusi										Skor 82				Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan
8	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara																	
	a	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88,78	Indikator ini merupakan hasil survei eksternal atas pelayanan system informasi di Mahkamah Konstitusi										88,78				Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi
	b	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai 3,4	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan 												3,4		Pusat Teknologi, Informasi dan



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)														
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. <ul style="list-style-type: none"> Indeks ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 															
c	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai 2,25	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merupakan hasil penilaian BPS IPS ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sectoral dan satu data Indonesia (SDI) 														2,25	Pusat Teknologi, Informasi dan

Jakarta, 2 Januari 2025
Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiryanto
Jabatan : **Plt. Panitera Konsitusi**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Mahkamah Konstitusi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,



Wiryanto



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-1095064379250213041000

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANITERA KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96
		2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	100%
		4. Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan	80%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%
		6. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 86,3

Ketua Mahkamah Konstitusi,



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2025

Plt. Panitera Konstitusi,



Wiryanto



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk2136876933250213041352

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANITERA KONSTITUSI**

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)	(9)		
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi															
a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Indikator ini melalui survey • Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan 									Skor 88,96			Kepaniteraan	
b	Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	Rumus : Jumlah Perkara Konstitusi yang diputus / Jumlah Perkara yang diregistrasi ditambah dengan sisa perkara tahun											70%	Kepaniteraan	



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			sebelumnya) x 100%													
c	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	100%	Rumus : Jumlah perkara yang selesai tepat waktu/Jumlah Total Perkara yang selesai pada tahun 2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepaniteraan
d	Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan	80%	Rumus : Jumlah putusan yang diupload tepat waktu/Jumlah Total putusan yang diupload tahun 2025	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Kepaniteraan
e	Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%	Rumus : Jumlah minutasi perkara yang tepat waktu/Jumlah minutasi perkara tahun 2025	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Kepaniteraan
f	Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 86,3	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada Kepaniteraan										Skor 86,3			Kepaniteraan

Jakarta, Januari 2025
Plt. Panitera Konstitusi
Wiryanto





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Garjito
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Pihak Pertama,



Tatang Garjito



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-537248023250201120538

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77%
		2. Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	Nilai 85
		3. Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai 23,92
		4. Tingkat Pelaporan Kinerja	Nilai 12,76
		5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 84,2
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57
		2. Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output	100
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,39%
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75



		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99%

Program /KRO/RO		Anggaran	
Dukungan Manajemen			
Layanan Perkantoran	Rp	109.475.494.000	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	3.250.000.000	
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	1.793.300.000	
Jumlah			Rp 114.518.794.000



**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)														
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja																		
	a Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77%																91,77%	
			Indikator Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan salah satu aspek dari penilaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Target Tercapai apabila Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran Perbendaharaan mencapai 91,77%	Penyusunan Dokumen Perencanaan	6 Dok	3 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	2 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok		Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)	
			1	Revisi POK TA 2025	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		
			2	Revisi DIPA melalui DJA/Kanwil TA 2025	1 Dok			1 Dok			1 Dok			1 Dok					
			3	Revisi Halaman III DIPA TA 2025		1 Dok		1 Dok			1 Dok			1 Dok					
			4	Perubahan Renja MK TA 2025							1 Dok								
			5	Laporan Hibah	1 Dok						1 Dok			1 Dok					



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				6	PNBP TA 2026 (Proposal PNPB, BA Penelaahan)	1 Dok												
				7	Usulan Pagu Indikatif MK TA 2026	1 Dok												
				8	Usulan Prioritas Nasional MK TA 2026		1 Dok											
				9	Reviu Angka Dasar TA 2026 (pemutakhiran angka dasar TA 2026 dan menyusun prakiraan maju TA 2027-2029)	1 Dok												
				10	Renja K/L pada Pagu Indikatif TA 2026				1 Dok									
				11	RKAKL pada Pagu Anggaran TA 2026 (RKAKL, BA, TOR RAB)						1 Dok							
				12	Bahan Nota Keuangan TA 2026							1 Dok						



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)														
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				13	RKAKL pada Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 (RKAKL, BA, TOR RAB)									1 Dok					
				14	RDP Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Laporan Keuangan 2024					1 Dok		1 Dok	1 Dok						
	b Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	85	Indikator Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran merupakan salah satu aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Nilai indikator ini dikeluarkan oleh Bappenas. Target Tercapai apabila Nilai											Nilai 85			Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)		
					Penyusunan Dokumen Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	4 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	
				1	Revisi Pemutakhiran Data DIPA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2	Sinkronisasi Renja-RKA K/L TA 2025	1 Dok												1 Dok	



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)														
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Indikator ini mencapai 85	3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2025	1 Dok													
				4	Revisi RUP TA 2025	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		
	c Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai 23,92	Indikator Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen dalam penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Target Tercapai apabila Nilai Indikator ini mencapai Nilai 23,92														Nilai 23,92	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	1 Dok	3 dok	1 Dok			2 Dok	1 Dok						
					1	Renstra MK 2025-2029							1 Dok						Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)
					2	Cascading Kinerja MK 2025-2029						1 Dok							
					3	Pohon Kinerja MK 2025-2029						1 Dok							
					4	SK Sekjen tentang Indikator Kinerja	1 Dok												
					5	Defini Operasional Indikator Kinerja			1 Dok										
					6	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)		1 Dok											
				7	Perjanjian Kinerja (PK)		1 Dok												



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab									
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)																					
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
				8	Penjelasan dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja		1 Dok																			
					Pengukuran Capaian Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			
				1	Laporan Capaian Pengukuran Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)	
	d Tingkat Pelaporan Kinerja	Nilai 12,76	Indikator Tingkat Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dalam penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Target Tercapai apabila Nilai Indikator ini																					90%	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)	
						Menyusun Dokumen Pelaporan Kinerja	12 dok	2 dok	2 dok	4 dok	2 dok	3 dok	4 dok	3 dok	2 dok	4 dok	2 dok	4 dok	2 dok	4 dok	2 dok	4 dok	2 dok	4 dok		
					1	Dokumen LAKIP	10 dok	2 dok																		
					2	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran (Monitoring Rencana Aksi dan Penyerapan Anggaran)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab				
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)																
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			mencapai Nilai 12,76	3	Laporan Money Prioritas Nasional (Bappenas)				1 Dok			1 Dok			1 Dok			1 Dok			
				4	Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dok			1 Dok			1 Dok			1 Dok			
				5	Survei Layanan Administrasi Umum						1 Dok										
				6	Survei Layanan Administrasi Eksternal							1 Dok									
				7	Laporan Monitoring Capaian Anggaran MK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			
	e Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 84,2	Indikator ini merupakan Hasil dari Survey Internal Mahkamah Konstitusi									84,2									Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
					Melaksanakan Layanan Perencanaan dan Keuangan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok			
				1	Laporan Monitoring	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			Bagian Perencanaan dan Evaluasi



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Revisi Anggaran													(Sub Bagian Program dan Anggaran)
				2 Laporan Monitoring Revisi RUP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				3 Laporan Monitoring Pembayaran Tagihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan																
	a Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57	Indikator Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu aspek dari penilaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Target Tercapai apabila Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran												96,57		Bagian Keuangan Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Perbendaharaan
				Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi	9 dok	9 dok	9 dok	11 dok	9 dok	9 dok	11 dok	9 dok	9 dok	11 dok	9 dok	11 dok	
				1 Laporan Monitoring Belanja Kontraktual	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2 Laporan Penerbitan SPM	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				3 Laporan Berita Acara SPD Rampung				1 Dok			1 Dok			1 Dok		1 Dok	



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Perbendaharaan mencapai 96,57	4	Laporan Penyelesaian Tagihan LS dan GU	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				5	Laporan Penyelesaian Tagihan/Pembayaran Kuitansi SPBy	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				6	Laporan Pengelolaan UP dan TUP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				7	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan KKP				1 Dok			1 Dok			1 Dok	1 Dok		
				8	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				9	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				10	Laporan PNBP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				11	Laporan Pajak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	b Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output	100	Indikator Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output merupakan salah satu aspek dari penilaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Target Tercapai apabila Nilai Indikator ini mencapai nilai 100															Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan)
				Melakukan Monitoring Capaian Output	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				1 Laporan Capaian Output yang Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	c Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	Opini merupakan pernyataan pernyataan professional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi.						WTP									Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan)
				Pelaksanaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4 dok	4 dok	3 dok	4 dok	3 dok	4 dok	4 dok	3 dok	3 dok	4 dok	3 dok	3 dok		
				1 Laporan Keuangan Semester I								1 dok						
				2 Laporan Keuangan Triwulan III											1 dok			



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Capaian kinerja. Target Tercapai apabila Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi mendapatkan opini WTP	3	Laporan Keuangan unaudited		1 dok											
				4	Laporan Keuangan audited				1 dok									
				5	Laporan Monitoring Ketidaksi-an Akun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
				6	Hasil Rekonsiliasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
				7	Laporan Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
				8	Laporan Pengendalian Internal atas Pelaporan keuangan	1 Dok					1 Dok		1 Dok					
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan																	
	a Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,29%	• Tingkat penggunaan produk dalam negeri (PDN) diukur dengan Tingkat Komponen															99,29%



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<p>Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah nilai dari penggunaan barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai TKDN dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan hasil monitoring masing-masing PPK/unit kerja setiap bulan pada aplikasi SAKTI 														
				<p>Melakukan penerapan penggunaan produk dalam negeri serta Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam</p>	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				negeri pada pengadaan barang/jasa													
				1 Laporan Penggunaan Produl Dalam Negeri	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	b Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK adalah penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public Nilai implementasi Core Value ASN berAkhlaq dikeluarkan oleh Biro SDMO berdasarkan laporan dari masing-masing eselon 													95%	



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi										Penanggung Jawab		
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			2 setiap bulan terkait dengan implementasi core values ASN Berakhlak di masing-masing unit kerja														
				Implementasi/Penerapan Core Value ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, AKuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				1 Laporan Kegiatan Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
c	Nilai Evaluasi SAKIP	A	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi SAKIP adalah proses penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 								A						



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja Komponen-komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh inspektorat 															
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	Laporan Capaian Kinerja unit kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		
				2	Laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP										1 Dok		
	D Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level, RML) adalah ukuran seberapa baik organisasi mengelola, menilai, dan memantau risiko Nilai kematangan manajemen risiko unit kerja dikeluarkan oleh inspektroat 												3		
					Penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan		3 dok								1 dok		



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				penanganan risiko serta monitoring													
				1 Surat Pernyataan Komitmen		1 Dok											
				2 Profil Risiko		1 Dok											
				3 Prioritas Risiko		1 Dok											
				4 Laporan Manajemen Risiko										1 dok			
e	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	<ul style="list-style-type: none"> Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah hasil dari penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil Nilai Pembangunan ZI unit kerja di keluarkan oleh TPI/Inspektorat 							75							
				Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK di Biro Perencanaan dan Keuangan		1 Dok				3 Dok						2 Dok	



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	Rencana Aksi ZI		1 Dok											
				2	Dokumen Pembangunan ZI					1 Dok							1 Dok	
				3	Laporan Monitoring Rencana Aksi ZI					1 Dok							1 Dok	
				4	LKE ZI					1 Dok								
	f Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	Hasil Penilaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SIVIKA														3	
					Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	3, 1 Dok	
				1	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2	Laporan Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	g Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun												99,00%		
					Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
				1	Dokumen Laporan Penyerapan Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Handayani

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Heru Setiawan



Sri Handayani



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-440899203250207103848

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	1. Tingkat Penyempurnaan Kualitas Tata Kelola Organisasi Mahkamah Konstitusi	100%
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	81,56
		3. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	2 unit kerja
		4. Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB	82,4
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM	1. Indeks Sistem Merit	395
		2. Tingkat Kepuasan Layanan SDM	82,4
		3. Tingkat Kompetensi dan Kinerja ASN	27,1
		4. Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN dan Non ASN	84,7
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1. Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri	94,2
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	3
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%



Kegiatan/KRO	Anggaran
1. Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Rp. 4.350.000.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 200.000.000,-
Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 3.950.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 200.000.000,-
2. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp. 3.740.000.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3.740.000.000,-
Jumlah	Rp. 8.090.000.000,-

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Pihak Pertama,



Sri Handayani



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-78437536250207111959

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

2.	Indeks BerAKHLAK ASN	81,56	<p>Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB atas Indeks ASN BerAKHLAK MK dengan target 81,56</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK yang dicapai}}{\text{target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\%$	1. Jumlah SP dan HD Unit Kerja	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi (Kepala Sub Bagian Fasilitasi RB)			
				2. Survey Layanan Administrasi Biro SDMO					1 Lap									
				3. Peningkatan kompetensi Unit Kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	
4. Dialog kinerja	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
3.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 Unit Kerja	<p>Target tercapai apabila terdapat dua unit kerja yang telah diikutsertakan dan lolos penilaian oleh TPI pada Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Realisasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM}}{\text{target Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM}} \times 100\%$	1. Sosialisasi kepada unit kerja Pelaksanaan WBBM			1 Dok	1 Dok							Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi (Kepala Sub Bagian Fasilitasi RB)			
				2. Pembentukan tim ZI unit kerja			1 Dok	1 Dok										
				3. Pelaksanaan pembangunan WBBM			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok					
				4. Evaluasi oleh TPI									1 Dok					
				5. Laporan ke Kemenpan RB oleh TPI										1 Dok		1 Dok		
4.	Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB	82,4	<p>Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan Survei Internal dengan target 82,4</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB yang dicapai}}{\text{target Skor Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB}} \times 100\%$	Hasil skor Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB						1 Lap					Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi (Kepala Sub Bagian Orta; Kepala Sub Bagian Fasilitasi RB)			
Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM																		
2.	1. Indeks Sistem Merit	395	<p>Target tercapai apabila nilai Indeks Sistem Merit mencapai Nilai 395</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Realisasi Indeks Sistem Merit yang dicapai}}{\text{target Indeks Sistem Merit}} \times 100\%$	1. Perencanaan kebutuhan	1 Dok		1 Dok								Kepala Bagian SDM (Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM; Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan PPNPN)			
				2. Pengadaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok					
				3. Pengembangan karier	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	
				4. Promosi dan mutasi			1 Dok	1 Dok										
				5. Manajemen Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok
				6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok



					7. Perlindungan dan pelayanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
					8. Sistem informasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
2.	Tingkat Kepuasan Layanan SDM	82,4	<p>Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan Survei Internal dengan target 82,4</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM yang dicapai}}{\text{target Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM}} \times 100\%$</p>	<p>Hasil skor Tingkat Kepuasan Layanan sumber daya manusia dan tingkat kepuasan layanan magang</p>						1 Dok							Kepala Bagian SDM (Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM; Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan PPNPN)
3.	Tingkat Kompetensi dan Kinerja ASN	27,1	<p>Indeks IP ASN yang dikeluarkan BKN (Rata-Rata Indikator Kompetensi dan Kinerja) dengan target 27,1</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Realisasi Tingkat Kompetensi dan Kinerja ASN yang dicapai}}{\text{target Tingkat Kompetensi dan Kinerja ASN}} \times 100\%$</p>	<p>Hasil penilaian IP ASN (rata-rata indikator kompetensi dan kinerja) yang dikeluarkan BKN</p>												1 Dok	Kepala Bagian SDM (Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM)
4.	Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN dan Non ASN	84,7	<p>Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan Survei Internal dengan target 82,4</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM yang dicapai}}{\text{target Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM}} \times 100\%$</p>	<p>Hasil skor Tingkat Kepuasan Layanan Poliklinik MK yang dilakukan oleh Biro Renkeu. Capaian kinerja setiap bulan dengan memperhatikan 10 laporan yang dihasilkan oleh Poliklinik MK</p>						1 Dok							Kepala Bagian SDM (Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian)





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Laksono

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,



Fajar Laksono



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature

mk-1391179069250211042524

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Tingkat Layanan Hukum	80
		2. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	80
		3. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	80
		4. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,8
		5. Tingkat Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya	29,2
		6. Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	80
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1. Tingkat Layanan Risalah Persidangan	80
		2. Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	80
		3. Tingkat Layanan Persidangan	80
		4. Tingkat Layanan Putusan	80
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,86%
		2. Persentase Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3

Program/KRO

Penanganan Perkara Konstitusi

Penanganan Perkara

Dukungan Manajemen

Layanan Perkantoran

Anggaran

Rp 366.133.125.000,-

Rp 120.000.000,-

Rp 366.253.125.000,-

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,

Fajar Laksono



PENJELASAN RENCANA AKSI
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)				
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Tingkat Layanan Hukum	Skor 80														Skor 80	Kabag HTUK	
				Target tercapai jika kepuasan Layanan Hukum terpenuhi sesuai target	1. Persentase Penyiapan Bahan Advokasi, Litigasi, dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					2. Laporan Penyusunan Konsep Surat Jawab Berdasarkan Disposisi Pimpinan				1 Lap			1 Lap			1 Lap		1 Lap		
					3. Laporan Penyusunan Telaahan Hukum Terhadap Surat Masuk Berdasarkan Disposisi Pimpinan				1 Lap			1 Lap			1 Lap		1 Lap		
					4. Laporan Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain				1 Lap			1 Lap			1 Lap		1 Lap		
					5. Laporan Pelayanan Konsultasi				1 Lap			1 Lap			1 Lap		1 Lap		
					6. Laporan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan				1 Lap			1 Lap			1 Lap		1 Lap		
		2. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	Skor 80														Skor 80	Kabag HTUK	
				Target tercapai jika kepuasan Layanan Administrasi Panitera Konstitusi terpenuhi sesuai target	1. Laporan Pelayanan Administrasi Panitera Konstitusi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		
		3. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Skor 80														Skor 80	Kabag HTUK	

				3.	Laporan Permohonan yang Ditarik Kembali Sebelum Diregistrasi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				4.	Laporan Ringkasan Permohonan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				5.	Laporan Layanan Fasilitas Sarana Prasarana Konsultasi Hukum											1 Lap	
				6.	Laporan Layanan Fasilitas Sarana Prasarana Penerimaan Permohonan											1 Lap	
3.	Tingkat Layanan Persidangan	Skor 80														Skor 80	Kabag Fasyantek
			Target tercapai jika kepuasan Layanan Persidangan terpenuhi sesuai target	1.	Laporan Data Persidangan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				2.	Laporan Ketepatan Waktu Sidang	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				3.	Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Sidang	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				4.	Laporan Panggilan Sidang	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				5.	Laporan Kehadiran Para Pihak	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				6.	Laporan Layanan Fasilitas Sarana Prasarana Persidangan											1 Lap	
4.	Tingkat Layanan Putusan	Skor 80														Skor 80	Kabag Fasyantek
			Target tercapai jika kepuasan Layanan Putusan terpenuhi sesuai target	1.	Laporan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				2.	Laporan Kompilasi Putusan Tematik Mahkamah Konstitusi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				3.	Laporan Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				4.	Laporan Penyelesaian E-Minutasi Berkas Perkara	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				5.	Laporan Ikhtisar Putusan Perkara	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				6.	Laporan Landmark Putusan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				7.	Laporan Ketepatan Waktu Unggah Putusan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				8.	Laporan Layanan Fasilitas Sarana Prasarana Pengolahan Putusan											1 Lap	
				9.	Laporan Koordinasi Pengamanan Persidangan											1 Lap	

				Keuangan tepat waktu sesuai SOP terpenuhi sesuai target	Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP															
--	--	--	--	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Fajar Laksono



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
Jabatan : Kepala Biro Humas dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Pihak Pertama,



Pan Mohamad Faiz Kusuma W.



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-1402424443250207091720

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 93,69
		2. Tingkat Layanan Kehumasan	Nilai 83,91
		3. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	Nilai 83
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 80
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai 80
		2. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	Nilai 80
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9%
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	3
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

Program/RO/KRO

Kerja Sama

Rp. 5.500.000.000

Data dan Informasi Publik

Rp. 13.405.006.000

Layanan Perkantoran

Rp. 6.900.00.000

Jumlah

Rp 25.805.006.000



Anggaran

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK																	
a.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 93,69	Target tercapai jika hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapat minimal nilai 93,69	1. Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik														Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
				2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik														Kasubag Humas
				3. Penyusunan laporan Keterbukaan Informasi Publik														
b.	Tingkat Layanan Kehumasan	Nilai 83,91	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan mendapat nilai 83,91	1. Pelaksanaan layanan kehumasan														Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan														Kasubag Humas



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			
				3. Melakukan survei tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan																
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan																
	c. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	Nilai 83	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mendapat nilai 83	1. Pelaksanaan layanan tata usaha pimpinan dan Keprotokolan																Kabag Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran tingkat layanan tata usaha pimpinan dan Keprotokolan																Kasubag Tata Usaha Pimpinan Kasubag Protokol



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			
				3. Melakukan survei tingkat layanan tata usaha pimpinan dan Keprotokolan bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan																
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan																
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi																			
a.	Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 80	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mendapat nilai 80	1. Penyebarluasan informasi mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi																Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Kasubag Humas
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang																Kasubag Kerja Sama Dalam Negeri



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
				relevan dengan pengukuran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi														
				3. Melakukan survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan														
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan														



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
				Mahkamah Konstitusi														
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan																	
	a. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai 80	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri mendapat nilai 80	1. Perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan kerja sama dengan mitra kerja Mahkamah Konstitusi di dalam negeri														Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Kasubag Kerja Sama Dalam Negeri
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran tingkat kerja sama dalam negeri														
				3. Melakukan survei tingkat kerja sama dalam negeri bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan														



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat kerja sama dalam negeri														
	b. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	Nilai 80	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional mendapat nilai 80	1. Perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan kerja sama dengan mitra kerja Mahkamah Konstitusi di tingkat internasional														Kabag Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Kasubag Sekretariat Tetap AACC
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran tingkat kerja sama internasional														Kasubag Kerja Sama Luar Negeri
				3. Melakukan survei tingkat kerja sama internasional bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan														



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat kerja sama internasional														
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol																	
	a. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9%	Tingkat penggunaan produk dalam negeri (PDN) diukur dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah nilai dari penggunaan barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri. Nilai TKDN dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil monitoring masing-masing PPK/unit kerja setiap bulan pada aplikasi SAKTI.	Melakukan penerapan penggunaan produk dalam negeri serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa serta penyusunan laporannya.														
	b. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	Implementasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK adalah penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam	Implementasi/Penerapan Core Value ASN BerAkhlaq (Berorientasi														



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)		
			<p>kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Nilai implementasi <i>Core Value</i> ASN berAkhlaq dikeluarkan oleh Biro SDMO berdasarkan laporan dari masing-masing eselon 2 setiap bulan terkait dengan implementasi <i>core values</i> ASN Berakhlak di masing-masing unit kerja</p>	<p>Pelayanan, AKuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) beserta penyusunan laporannya</p>															
c.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	<p>Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja.</p> <p>Komponen-komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja.</p>	<p>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP</p>															



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
			Nilai Evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat.															
d.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	Tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level, RML) adalah ukuran seberapa baik organisasi mengelola, menilai, dan memantau risiko. Nilai kematangan manajemen risiko unit kerja dikeluarkan oleh Inspektorat.	Penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta monitoring														
e.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah hasil dari penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Nilai Pembangunan ZI unit kerja di keluarkan oleh TPI/Inspektorat.	Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK di Biro Humas dan Protokol, berupa Rencana Aksi, Dokumen Pembangunan, Laporan Monitoring Rencana Aksi, dan LKE Zona Integritas														
f.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab	3	Hasil Penilaian Penyelesaian	Penyelesaian Pertanggungjawaban														



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
	an Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP		Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SIVIKA	Keuangan beserta Laporrannya														
	g. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun	Penyerapan Anggaran Biro Humas dan Protokol beserta penyusunan laporannya														

Jakarta, 2 Januari 2025
Kepala Biro Humas dan Protokol

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Budi Wijayanto**

Jabatan : **Kepala Biro Umum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Heru Setiawan**

Jabatan : **Sekretaris Jenderal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

NIP. 19690609 199303 1 001

Pihak Pertama,



Budi Wijayanto

NIP. 19810408 200604 1 007



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature

mk1080273805250207064127

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERJANJIAN KERJA
KEPALA BIRO UMUM
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1.	Tingkat Layanan Biro Umum	84,5
		2.	Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan	28,73
		3.	Tingkat Pengelolaan BMN	1,76
		4.	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian BMN	1,27
		5.	Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal	87,48
		6.	Tingkat Pengawasan Arsip Internal	95,39
		7.	Tingkat Digitalisasi Arsip	81
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Umum	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	79
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhhlak	95%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%



Program/KRO		Anggaran
3369.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 46.379.180.000
3369.EBA.001	Layanan Pengadaan dan Jasa dan Perlengkapan Perkantoran	Rp. 270.355.000
3369.EBA.956	Layanan BMN	Rp. 99.000.000
3369.EBA.962	Layanan Umum	Rp. 98.400.000
3369.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp. 38.751.425.000
3369.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp. 3.100.000.000
3369.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Rp. 4.060.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Mengetahui
Sekretaris Jenderal



Heru Setiawan

Kepala Biro Umum,



Budi Wijayanto



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-261789835250207064316

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIRO UMUM

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya																	
1	Tingkat Layanan Biro Umum	Skor 84,5	Target tercapai jika hasil survei kepuasan layanan Biro Umum minimal 84,5. Rumus Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> Bersama dengan Biro Renkeu melakukan Identifikasi indikator layanan yang akan diukur dalam survei. Penyusunan instrumen survei (kuesioner atau metode lainnya). Penetapan metode survei (online, wawancara, atau manual). Penyebaran kuesioner kepada responden (pegawai MK, mitra kerja, pihak terkait lainnya). Pengolahan dan analisis hasil survei untuk mendapatkan insight terkait layanan Biro Umum. Analisis hasil survei untuk mengidentifikasi 													Skor 84,5	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan



			Rumus Hasil Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal dari ANRI	Hasil Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip oleh ANRI			Survei												
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Umum																		
1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	<p>Tingkat penggunaan produk dalam negeri diukur menggunakan 2 komponen yaitu Alokasi PDN dalam RUP dan Transaksi Belanja PDN :</p> <p>Rumus Alokasi PDN dalam RUP (Tagging PDN dalam RUP Penyedia)/(RUP Penyedia)x100%</p> <p>Transaksi Belanja PDN (Transaksi PDN Penyedia/Transaksi Penyedia)x100%</p> <p>Tingkat Penggunaan PDN (Alokasi PDN dalam RUP+Transaksi Belanja PDN/2)x100%</p> <p>Perhitungan tingkat penggunaan diambil dari aplikasi LPSE-AMEL-Monitoring</p>	Hasil Nilai TPPDN atas pengadaan di MK dan Biro Umum													Nilai 79	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan	



		Atau Penilaian TKDN Dari Biro Renkeu																
2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kemepan RB atas ASN MK minimal 95%	Hasil indeks ber ASN AHKLAK													Nilai 95%	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
3	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro Umum oleh Inspektorat mencapai nilai minimal BB	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro Umum oleh Inspektorat													BB	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Hasil penilaian manajemen resiko di Biro Umum oleh Inspektorat mencapai minimal 3	Hasil penilaian manajemen resiko di Biro Umum oleh Inspektorat													Nilai 3	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	Target tercapai jika Hasil WBK dari Tim Penilai Internal mendapatkan nilai minimal 75	Hasil Evaluasi dari Tim Penilai Internal Tahapan: 1. Penyusunan Tim WBK 2. Pelaksanaan Survei dan pemenuhan Area WBK													B	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan



6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	Target Tercapai jika penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat sesuai SOP pada Sivika	Penilaian dari Biro Renkeu													3	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99 %	Target Tercapai jika penyerapan anggaran 99%	Hasil Penilaian dari Sivika													99%	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Biro Umum

Budi

Wijayanto





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sigit Purnomo
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Menyetujui
Pihak Kedua,



Heru Setiawan
NIP. 19690609 199303 1 001

Pihak Pertama,



Sigit Purnomo
NIP. 19680518 199203 1 002



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-1701705563250201031645

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.32
		2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
		3	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46
		4	Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83,1
		5	Indeks Manajemen Risiko	3,21
2	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	1	Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15
		2	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,18
		3	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhhlak	95%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

Program / Rincian Output

Anggaran

Dukungan Manajemen

Layanan Audit Internal

Rp 550.000.000

Jumlah

Rp 550.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025

**Inspektur,
Sigit Purnomo
NIP. 19680518 199203 1 002**



**PENJELASAN RENCANA KINERJA
INSPEKTORAT
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					TW I			TW II			TW III			TW IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko																	
	a	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,32	Target tercapai jika nilai maturitas SPIP yang diterbitkan oleh BPKP mencapai 3,32														Inspektur; Auditor
				Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi														Inspektur; Auditor
				Audit Tujuan Tertentu atas Pembayaran Horarium Dukungan Penanganan Perkara Sengkata Pemilihan Umum Kepada Daerah														Inspektur; Auditor
				Audit Kinerja atas Manajemen Kinerja PPPK pada Biro SDMO														Inspektur; Auditor
				Audit Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum														Inspektur; Auditor



					Pergeseran/ Penyesuaian)													
					Reviu P3DN													Inspektur; Auditor
					Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi													Inspektur; Auditor
	b	Level Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai 3	Target tercapai jika nilai Kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh BPKP mencapai Level 3														Inspektur; Auditor
					Pengembangan Kompetensi APIP													Inspektur; Kasubbag TU; Auditor
					Pelaksanaan Telaah Sejawat													Inspektur; Auditor
					Pembangunan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP													Inspektur; Auditor
					Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP													Inspektur; Auditor
					Monitoring TLHP APIP SMT I													Inspektur; Auditor
					Monitoring TLHP APIP SMT II													Inspektur; Auditor
	c	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46	Target tercapai jika nilai persentase tindaklanjut yang diterbitkan oleh BPK mencapai 97,46%														Inspektur; Auditor





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kurniasih Panti Rahayu**
Jabatan : **Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Heru Setiawan**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua,



Heru Setiawan
NIP. 196906091993031001

Jakarta, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,



Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 196705301997032001



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-695160106250212024157

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN
PENGLOLAAN PERPUSTAKAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1. Tingkat layanan rekomendasi kebijakan strategis	80
		2. Tingkat layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	89,32
		3. Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32
2.	Meningkatnya Kualitas Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

Program/KRO	Anggaran
1. Program Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 4.331.185.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 270.000.000
Jumlah	Rp 4.601.185.000



		2. Tingkat layanan Perpustakaan dan layanan literasi konstitusi	89,32	<p>Target tercapai jika hasil survei menunjukkan skor 89,32 untuk pengukuran layanan Perpustakaan dan pemenuhan referensi literasi konstitusi.</p> <p>Rumus Hasil survei dibagi dengan target indikator dikalikan 100%</p>	<p>Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="961 224 995 331">1.</td> <td data-bbox="995 224 1350 331">Penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 331 995 412">2.</td> <td data-bbox="995 331 1350 412">Perencanaan survei pengukuran layanan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 412 995 1159">3.</td> <td data-bbox="995 412 1350 1159"> Pelaksanaan kegiatan: 1. Kegiatan peminjaman/sirkulasi buku 2. Kegiatan penataan perpustakaan 3. Kegiatan pemilahan dan pelabelan buku 4. Kegiatan sinkronisasi data InlisLITE 5. Kegiatan sertifikasi Pustakawan 6. Kegiatan diklat/workshop bagi Pustakawan 7. Kegiatan pemenuhan kebutuhan referensi bagi internal dan eksternal 8. Kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi 9. Kegiatan ICCIS 10. Kegiatan penyusunan buku 11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Jurnal dan Buku terbitan Mahkamah Konstitusi 12. Kegiatan diklat/workshop bagi pengelola Jurnal Mahkamah Konstitusi </td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 1159 995 1240">4.</td> <td data-bbox="995 1159 1350 1240">Penyusunan Laporan / naskah akademik/ rekomendasi sebagai hasil pelaksanaan kegiatan</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 1240 995 1273">5.</td> <td data-bbox="995 1240 1350 1273">Pelaksanaan kegiatan survei</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 1273 995 1330">6.</td> <td data-bbox="995 1273 1350 1330">Monitoring dan evaluasi berdasar hasil survei</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1.	Penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi																			2.	Perencanaan survei pengukuran layanan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi																			3.	Pelaksanaan kegiatan: 1. Kegiatan peminjaman/sirkulasi buku 2. Kegiatan penataan perpustakaan 3. Kegiatan pemilahan dan pelabelan buku 4. Kegiatan sinkronisasi data InlisLITE 5. Kegiatan sertifikasi Pustakawan 6. Kegiatan diklat/workshop bagi Pustakawan 7. Kegiatan pemenuhan kebutuhan referensi bagi internal dan eksternal 8. Kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi 9. Kegiatan ICCIS 10. Kegiatan penyusunan buku 11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Jurnal dan Buku terbitan Mahkamah Konstitusi 12. Kegiatan diklat/workshop bagi pengelola Jurnal Mahkamah Konstitusi																			4.	Penyusunan Laporan / naskah akademik/ rekomendasi sebagai hasil pelaksanaan kegiatan																			5.	Pelaksanaan kegiatan survei																			6.	Monitoring dan evaluasi berdasar hasil survei																			<p>- Kabid P2SK - Kabid P3</p>
1.	Penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi																																																																																																																													
2.	Perencanaan survei pengukuran layanan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi																																																																																																																													
3.	Pelaksanaan kegiatan: 1. Kegiatan peminjaman/sirkulasi buku 2. Kegiatan penataan perpustakaan 3. Kegiatan pemilahan dan pelabelan buku 4. Kegiatan sinkronisasi data InlisLITE 5. Kegiatan sertifikasi Pustakawan 6. Kegiatan diklat/workshop bagi Pustakawan 7. Kegiatan pemenuhan kebutuhan referensi bagi internal dan eksternal 8. Kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi 9. Kegiatan ICCIS 10. Kegiatan penyusunan buku 11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Jurnal dan Buku terbitan Mahkamah Konstitusi 12. Kegiatan diklat/workshop bagi pengelola Jurnal Mahkamah Konstitusi																																																																																																																													
4.	Penyusunan Laporan / naskah akademik/ rekomendasi sebagai hasil pelaksanaan kegiatan																																																																																																																													
5.	Pelaksanaan kegiatan survei																																																																																																																													
6.	Monitoring dan evaluasi berdasar hasil survei																																																																																																																													



		3.	Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32	Target tercapai jika hasil survei menunjukkan skor 84,32 untuk pengukuran layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi Rumus Hasil survei dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi										- Kabid P2SK - Pustakawan				
						1.	Penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang terkait dengan penguatan lembaga													
						2.	Perencanaan survei pengukuran tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi (berupa konsep kuesioner, target responden, dan waktu pelaksanaan survei)													
						3.	Pelaksanaan kegiatan 1. Kegiatan penerimaan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi 2. Kegiatan <i>maintenance</i> Pusat Sejarah Konstitusi													
						4.	Penyusunan Laporan / naskah akademik/ rekomendasi sebagai hasil pelaksanaan kegiatan													
						5.	Pelaksanaan kegiatan survei													
						6.	Monitoring dan evaluasi berdasar hasil survei													
2.	Meningkatnya Kualitas Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,26	Target tercapai jika penggunaan produk dalam negeri Puslitka mencapai angka 97,26 Rumus Hasil pengukuran dari Biro Renkeu tentang penggunaan produk dalam negeri di aplikasi SAKTI dibagi dengan target indikator dikali 100%	1.	Monitoring daftar kegiatan dan daftar pembelanjaan Puslitka tahun 2025													- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Staf PPK
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlahk	95%	Target tercapai jika hasil penilaian atas indeks core value ASN BerAkhlahk mencapai 95%	1.	Monitoring kinerja pegawai di unit kerja Puslitka													- Kasubbid TU - Staf PPK
						2.	Monitoring pelaksanaan implementasi core ASN BerAkhlahk													



				Rumus Hasil penilaian indeks ASN BerAkhlak dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	3. Penyiapan dokumen pendukung implementasi core ASN BerAkhlak 4. Evaluasi hasil penilaiain indeks ASN BerAkhlak	[Green Grid]	
3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	Target tercapai jika nilai evaluasi SAKIP mencapai BB Rumus Nilai evaluasi SAKIP Tahun 2024 dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	1. Monitoring hasil evaluasi LAKIP Puslitka tahun 2024 2. Finalisasi LAKIP Puslitka Tahun 2024 3. Monitoring pengumpulan bukti dukung LAKIP Puslitka tahun 2-25 penyusunan LAKIP Tahun 2025 4. Pembentukan tim penyusun LAKIP Puslitka tahun 2025 5. Kick-off penyusunan LAKIP Puslitka tahun 2025	[Green Grid]	- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Pustakawan - Pengelola Jurnal - Staf PPK	
4.	Tingkat kematangan Manajemen Risiko	3	Target tercapai jika nilai kematangan manajemen risiko mencapai 3 Rumus Nilai kematangan manajemen risiko dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	1. Evaluasi hasil tingkat kematangan manajemen risiko tahun 2024 2. Penyusunan tim pengendali risiko di masing-masing bidang di unit kerja 3. Monitoring pelaksanaan tahapan manajemen risiko di masing-masing bidang unit kerja 4. Monitoring penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko di unit kerja 5. Evaluasi hasil penilaian kematangan manajemen risiko di unit kerja tahun 2025	[Green Grid]	- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Pustakawan	
5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	Target tercapai jika nilai pembangunan Zona Integritas mencapai 75 Rumus Nilai pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh TPI (Inspektorat)	1. Penyusunan tim pembangunan zona integritas per zona integritas 2. Monitoring penyusunan dokumen pembangunan zona integritas 3. Finalisasi laporan pembangunan Zona Integritas 4. Evaluasi dokumen Zona Integritas	[Green Grid]	- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Pustakawan	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanang Subekti
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Pihak Pertama,



Nanang Subekti



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-1589008733250207065045

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik	100%
		2. Persentase General Administration System berbasis Elektronik	100%
		3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 85.25
		4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3.1
		5. Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	65
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3

Program /KRO/RO	Anggaran
Program Penanganan Perkara Konstitusi	
Sistem Teknologi dan Informasi	Rp 15.600.000.000
Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan	Rp 1.000.000.000
Program Dukungan Manajemen	
Layanan Perkantoran	Rp 800.000.000
Jumlah	Rp 17.400.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10)	
(7)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)	
1. Meningkatkan Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara																		
1.	Persentase Dukungan Sistem Informasi pada Judicial Administration System	100%	Target tercapai jika Persentase dukungan sistem informasi Judicial Administration System terpenuhi atau melewati target	Melaksanakan Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi pada JAS	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
	a			Laporan pengembangan dan updating aplikasi SIMPP (PUU, SKLN, dan PHPU)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI
	b			Laporan tersedianya perangkat, jaringan ruang RPH dan Sidang MKRI	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI
2.	Persentase Dukungan Sistem Informasi pada General Administration System	100%	Target tercapai jika Persentase dukungan sistem informasi pada General Administration System terpenuhi atau melewati target	Melaksanakan Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi pada GAS	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
	a			Laporan pengembangan dan updating aplikasi SIVIKA, SIGAPP, E-Kinerja, SIMPEG, dll	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI
	b			Laporan tersedianya perangkat, jaringan pada semua unit kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI
3.	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 85.25	Target tercapai jika tingkat layanan sistem informasi terpenuhi atau melewati target. Nilai diperoleh dari survei internal.	Pelaksanaan Layanan Sistem Teknologi dan Informasi													85.25	
					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
	a			Laporan layanan sistem informasi dan data	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
	b			Laporan layanan infrastruktur dan jaringan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi



No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab					
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)																	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)					
2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	Target tercapai jika tingkat implementasi core value ASN BerAkhlaq terpenuhi. Nilai core value ASN BerAkhlaq dikeluarkan oleh SDMO.	Implementasi/ penerapan Core Value ASN BerAkhlaq														95%	Sub Bagian TU			
				a Laporan Kegiatan Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok		
3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	Target tercapai jika nilai evaluasi SAKIP terpenuhi. Nilai evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja														BB	Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Bidang SI dan Layanan Data			
				a Laporan Capaian Kinerja unit kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok					
				b Laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP													1 Dok					
4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	Target tercapai jika tingkat kematangan manajemen risiko terpenuhi. Nilai tingkat kematangan manajemen risiko dikeluarkan oleh Inspektorat.	Penyusunan laporan Penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta monitoring														3	Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Bidang SI dan Layanan Data, Pracom Madya, Pracom Muda, Pracom Pertama			
				a Surat Pernyataan Komitmen		1 Dok															1 Dok	
				b Profil Risiko		1 Dok																
				c Prioritas Risiko		1 Dok																
				d Laporan Manajemen Risiko																		1 Dok
5.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	Target tercapai jika tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SIVIKA	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan														3	Staf PPK			
				a Laporan Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok		2 Dok		
				b Laporan Penyerapan Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok		

Jakarta, 2 Januari 2025
Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Nanang Subekti





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mundiri

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,



Mundiri



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-871259436250207015600

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,15
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.63
		3. Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 85,2
2.		1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 94
		2. Tingkat Implementasi <i>Core Value</i> ASN BerAkhlak	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	94.2
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99%



Program /KRO/RO		Anggaran
1	Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 9.000.000.000
Output	Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi (750 org)	Rp 4.000.000.000
Output	Pembangunan e-Learning	Rp 1.000.000.000
Output	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (750 org)	Rp 4.000.000.000
2	Dukungan Manajemen	Rp 1.945.000.000
Output	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pusdik	Rp 530.000.000
Output	Pengadaan Fasilitas Gedung Pusdik	Rp 1.415.000.000
Jumlah		Rp 10.945.000.000



**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output													Penanggung Jawab	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)						(9)			(10)				
1	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK																	
a.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,15	Indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dicapai Berdasarkan rata-rata tingkat kenaikan gap dari nilai pretest dan posttest pemahaman peserta setelah mengikuti pendidikan pada kegiatan Bimbingan Teknis, PPHKWN, dan kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi lainnya Target tercapai jika minimum skor sesuai dengan yang direncanakan yaitu 89,15	Penyusunan Dokumen Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran		2 Dok		3 Dok	2 Dok	5 Dok	3 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	1 Dok	89,15	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
				1 Kurikulum Pendidikan				1 Dok										
				2 Silabus Pendidikan				1 Dok										
				3 Analis Kebutuhan Pendidikan				1 Dok										
				4 Kalender Pendidikan				1 Dok										
				5 Dokumen konsep pengembangan penyelenggaraan pendidikan													1 Dok	
				6 Dokumen rencana pengembangan E-Learning						1 Dok								
				7 Dokumen Instrumen Pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran				1 Dok	1 Dok	3 Dok		2 Dok	1 Dok	2 Dok				
				8 Dokumen Evaluasi Kegiatan Pendidikan					1 Dok	1 Dok	3 Dok		2 Dok	1 Dok	2 Dok			
b.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.63	Indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan diperoleh melalui survei peserta pendidikan melalui metode pengisian kuesioner. Nilai Indikator ini terdiri dari Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan dan Tingkat Kepuasan Layanan Sarana Prasarana. Target tercapai jika minimum nilai sesuai dengan yang direncanakan yaitu 3,63	Penyusunan Dokumen Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	5 Dok	6 Dok	11 Dok	5 Dok	6 Dok	14 Dok	8 Dok	6 Dok	12 Dok	7 Dok	7 Dok	14 Dok	3.63	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum
				1 Dokumen Laporan Kegiatan Penyelenggaraan tiap kegiatan					1 Dok	1 Dok	3 Dok		2 Dok	1 Dok	2 Dok			
				2 Dokumen Survei dan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Peserta Pembelajaran						1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
				3 Dokumen Sarana Prasarana dan Dokumen Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	5 Dok	6 Dok	11 Dok	5 Dok	5 Dok	12 Dok	5 Dok	5 Dok	10 Dok	5 Dok	5 Dok	13 Dok		



c.	Nilai Evaluasi SAKIP	A	Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja. Nilai Evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh inspektorat. Target tercapai jika nilai evaluasi sesuai dengan yang direncanakan yaitu nilai A									A						Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum				
				Pemantauan dokumen capaian kinerja Pusdik	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok					
				1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok					
				2 LAKIP Pusdik Tahun 2024	1 Dok																	
				3 Dokumen Tanggapan Notisi atas Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi							1 Dok											
													1 Dok									
d.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai kematangan manajemen risiko unit kerja dikeluarkan oleh inspektorat. Nilai tercapai jika tingkat kematangan manajemen resiko Pusdik mencapai level 3														3	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum				
				Penyusunan dokumen penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta monitoring																1 Dok		
				1 Surat Pernyataan Komitmen																		
				2 Profil Risiko																		
				3 Prioritas Risiko																		
																	1 Dok					
e.	Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	Nilai 94.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan hasil penilaian dari TPI (Inspektorat) dengan kriteria Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 94.2														94.2	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum				
				Pemenuhan dokumen pembangunan ZI Pusdik menuju WBBM																	1 Dok	
				1 Rencana Aksi ZI																		
				3 Laporan Monitoring Rencana Aksi ZI																		1 Dok
				4 LKE ZI																		



	f. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	Hasil Penilaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SIMKA														3	Kepala Bagian Umum Staf PPK
				Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Pusdik	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok		
				1 Laporan Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		
				2 Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan			1 Lap			1 Lap			1 Lap			1 Lap		
	g. Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun														99%	Kepala Bagian Umum Staf PPK
				Monitoring Penyerapan Anggaran Pusdik	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok		
				1 Laporan Penyerapan Anggaran Pusdik	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		
				2 Laporan Rencana Aksi, dan Rencana Penyerapan Anggaran			1 Lap			1 Lap			1 Lap			1 Lap		

